BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 MARET 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bengkalis telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.167/II/2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp. 3.271.263.535.000,00
2. Belanja Daerah		Rp. 4.766.263.535.000,00
	Surplus/(Defisit	Rp.(1.495.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan Rp. 1.500.000.000.000,00
   b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
   Pembiayaan Netto Rp. 1.495.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 235.120.650.000,00
   b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.994.142.885.000,00
   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 42.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 32.260.000.000,00
   b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 24.727.550.000,00
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 30.800.000.000,00
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 147.333.100.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 2.952.228.124.000,00
   b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 31.862.241.000,00
   c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 10.052.520.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
   b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
   c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 42.000.000.000,00
   d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
   e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.712.094.766.542,58

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 3.054.168.768.457,42

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 981.036.736.455,92
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00

c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 13.371.928.467,00

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 287.248.700.732,69

e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 7.620.800.000,00

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 411.502.810.500,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 11.313.790.386,97

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 173.280.341.731,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 814.241.950.166,00
c. Belanja modal sejumlah Rp. 2.066.646.476.560,42

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 1.500.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 1.200.000.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 300.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Kriteria untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerinahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 Maret 2012

KABUPATEN BENGKALIS

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR			URAIAN	JUMLAH
4			PENDAPATAN DAERAH	3,271,263,535,000.00
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	235,120,650,000.00
4	1	1	Hasil Pajak Daerah	32,260,000,000.00
4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	24,727,550,000.00
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,800,000,000.00
4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	147,333,100,000.00
4	2		DANA PERIMBANGAN	2,994,142,885,000.00
4	2	1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2,952,228,124,000.00
4	2	2	Dana Alokasi Umum	31,862,241,000.00
4	2	3	Dana Alokasi Khusus	10,052,520,000.00
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42,000,000,000.00
4	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	42,000,000,000.00
5			BELANJA DAERAH	4,766,263,535,000.00
5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,712,094,766,542.58
5	1	1	Belanja Pegawai	981,036,736,455.92
5	1	3	Belanja Subsidi	13,371,928,467.00
5	1	4	Belanja Hibah	287,248,700,732.69
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	7,620,800,000.00
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	411,502,810,500.00
5	1	8	Belanja Tidak Terduga	11,313,790,386.97
5	2		BELANJA LANGSUNG	3,054,168,768,457.42
5	2	1	Belanja Pegawai	173,280,341,731.00
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	814,241,950,166.00
5	2	3	Belanja Modal	2,066,646,476,560.42
			SURPLUS / (DEFISIT)	(1,495,000,000,000.00)
6			PEMBIAYAAN DAERAH	1,495,000,000,000.00
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,500,000,000,000.00
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SilPA)	1,200,000,000,000.00
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	300,000,000,000.00
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000.00
6	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00
			PEMBIAYAAN NETTO	1,495,000,000,000.00
6	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00

BUPATI BENGKALIS

(H. HERLIYAN SALEH)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TANGGAL 11 Maret 2013

KABUPATEN BENGKALIS

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2013

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6
1			**URUSAN WAJIB**	**3,271,222,735,000.00**	**1,670,148,210,551.33**	**2,859,638,964,911.42**	**4,529,787,175,462.75**
1	**01**		**PENDIDIKAN**	**0.00**	**536,192,650,901.92**	**381,398,734,111.00**	**917,591,385,012.92**
1	01	01	Dinas Pendidikan	0.00	536,192,650,901.92	381,398,734,111.00	917,591,385,012.92
1	**02**		**KESEHATAN**	**15,000,000,000.00**	**109,852,423,717.13**	**149,327,244,724.00**	**259,179,668,441.13**
1	02	01	Dinas Kesehatan	0.00	50,859,001,140.11	70,864,261,741.00	121,723,262,881.11
1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12,000,000,000.00	33,417,428,442.58	45,130,939,413.00	78,548,367,855.58
1	02	03	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	3,000,000,000.00	25,575,994,134.44	33,332,043,570.00	58,908,037,704.44
1	**03**		**PEKERJAAN UMUM**	**0.00**	**12,440,510,303.47**	**1,399,784,870,025.00**	**1,412,225,380,328.47**
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum	0.00	12,440,510,303.47	1,388,487,047,546.00	1,400,927,557,849.47
1	03	02	Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)	0.00	0.00	11,297,822,479.00	11,297,822,479.00
1	**04**		**PERUMAHAN**	**0.00**	**0.00**	**105,290,860,129.00**	**105,290,860,129.00**
1	04	01	Urusan Perumahan (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)	0.00	0.00	57,214,647,665.00	57,214,647,665.00
1	04	02	Urusan Perumahan (Dinas Pekerjaan Umum)	0.00	0.00	48,076,212,464.00	48,076,212,464.00
1	**05**		**PENATAAN RUANG**	**0.00**	**9,854,489,882.00**	**23,550,118,613.00**	**33,404,608,495.00**
1	05	01	Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman	0.00	9,854,489,882.00	22,953,068,513.00	32,807,558,395.00
1	05	02	Urusan Penataan Ruang (Sekretariat Daerah)	0.00	0.00	297,804,000.00	297,804,000.00
1	05	03	Urusan Penataan Ruang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	0.00	0.00	299,246,100.00	299,246,100.00
1	**06**		**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**0.00**	**11,488,843,787.32**	**21,319,375,151.00**	**32,808,218,938.32**
1	06	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00	11,488,843,787.32	19,703,573,501.00	31,192,417,288.32
1	06	02	Urusan Perencanaan Pembangunan (Sekretariat Daerah)	0.00	0.00	243,336,400.00	243,336,400.00
1	06	03	Urusan Perencanaan Pembangunan (Badan Pengelola Perbatasan)	0.00	0.00	1,372,465,250.00	1,372,465,250.00
1	**07**		**PERHUBUNGAN**	**5,140,050,000.00**	**11,611,413,853.00**	**59,580,281,290.00**	**71,191,695,143.00**
1	07	01	Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika	5,140,050,000.00	11,611,413,853.00	59,580,281,290.00	71,191,695,143.00
1	**08**		**LINGKUNGAN HIDUP**	**700,000,000.00**	**14,020,278,160.00**	**67,090,116,088.92**	**81,110,394,248.92**
1	08	01	Badan Lingkungan Hidup	0.00	5,928,510,234.00	13,550,405,538.92	19,478,915,772.92
1	08	02	Dinas Pasar dan Kebersihan	700,000,000.00	8,091,767,926.00	33,447,182,550.00	41,538,950,476.00
1	08	04	Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman)	0.00	0.00	17,961,858,700.00	17,961,858,700.00
1	08	06	Urusan Lingkungan Hidup (Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran)	0.00	0.00	2,130,669,300.00	2,130,669,300.00
1	**09**		**PERTANAHAN**	**0.00**	**0.00**	**37,490,174,314.00**	**37,490,174,314.00**
1	09	02	Urusan Pertanahanan (Dinas Pasar dan Kebersihan)	0.00	0.00	5,311,688,150.00	5,311,688,150.00
1	09	04	Urusan Pertanahan (Sekretariat Daerah)	0.00	0.00	2,402,601,064.00	2,402,601,064.00
1	09	12	Urusan Pertanahan (Dinas Pekerjaan Umum)	0.00	0.00	27,260,550,400.00	27,260,550,400.00
1	09	14	Urusan Pertanahan (Dinas Sosial)	0.00	0.00	2,479,734,700.00	2,479,734,700.00
1	09	20	Urusan Pertanahan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	0.00	0.00	35,600,000.00	35,600,000.00
1	**10**		**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**270,000,000.00**	**7,607,407,910.04**	**6,471,545,700.00**	**14,078,953,610.04**
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	270,000,000.00	7,607,407,910.04	6,471,545,700.00	14,078,953,610.04
1	**11**		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**0.00**	**4,649,604,428.56**	**4,959,661,874.00**	**9,609,266,302.56**
1	11	01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0.00	4,649,604,428.56	4,959,661,874.00	9,609,266,302.56
1	**12**		**KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**0.00**	**0.00**	**1,557,087,600.00**	**1,557,087,600.00**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6
1	12	01	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)	0.00	0.00	1,557,087,600.00	1,557,087,600.00
1	**13**		**SOSIAL**	**0.00**	**7,363,653,307.00**	**50,507,268,790.00**	**57,870,922,097.00**
1	13	01	Dinas Sosial	0.00	7,363,653,307.00	27,895,369,500.00	35,259,022,807.00
1	13	02	Urusan Sosial (Sekretariat Daerah)	0.00	0.00	22,611,899,290.00	22,611,899,290.00
1	**14**		**KETENAGAKERJAAN**	**0.00**	**6,447,811,425.00**	**19,788,464,622.00**	**26,236,276,047.00**
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00	6,447,811,425.00	19,788,464,622.00	26,236,276,047.00
1	**15**		**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**0.00**	**5,495,900,526.00**	**9,106,647,315.00**	**14,602,547,841.00**
1	15	01	Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah	0.00	5,495,900,526.00	9,106,647,315.00	14,602,547,841.00
1	**16**		**PENANAMAN MODAL**	**2,707,200,000.00**	**4,861,050,949.00**	**7,932,374,905.00**	**12,793,425,854.00**
1	16	01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	2,707,200,000.00	4,861,050,949.00	7,932,374,905.00	12,793,425,854.00
1	**17**		**KEBUDAYAAN**	**0.00**	**7,798,002,647.16**	**5,979,982,206.00**	**13,777,984,853.16**
1	17	01	Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga	0.00	7,798,002,647.16	5,979,982,206.00	13,777,984,853.16
1	**18**		**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**	**0.00**	**0.00**	**30,229,080,780.00**	**30,229,080,780.00**
1	18	01	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga)	0.00	0.00	8,614,165,100.00	8,614,165,100.00
1	18	04	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Pekerjaan Umum)	0.00	0.00	21,614,915,680.00	21,614,915,680.00
1	**19**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**	**0.00**	**18,702,826,554.04**	**21,703,770,566.00**	**40,406,597,120.04**
1	19	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	4,789,034,230.00	5,650,249,755.00	10,439,283,985.00
1	19	02	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	8,153,583,575.14	11,354,601,183.00	19,508,184,758.14
1	19	03	Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0.00	5,760,208,748.90	4,698,919,628.00	10,459,128,376.90
1	**20**		**OTONOMI DAERAH;PEMERINTAHAN UMUM;ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH;PERANGKAT DAERAH;KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**	**3,247,405,485,000.00**	**879,771,615,999.35**	**372,449,951,376.50**	**1,252,221,567,375.85**
1	20	01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	0.00	13,070,565,080.00	0.00	13,070,565,080.00
1	20	02	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	0.00	786,523,911.78	0.00	786,523,911.78
1	20	03	Sekretariat Daerah	3,215,145,485,000.00	776,933,955,636.66	192,930,245,479.00	969,864,201,115.66
1	20	04	Sekretariat DPRD	0.00	7,549,508,728.36	45,031,359,036.00	52,580,867,764.36
1	20	05	Badan Penelitian dan Pengembangan	0.00	4,425,742,929.04	9,484,928,642.00	13,910,671,571.04
1	20	06	Inspektorat	0.00	5,628,953,459.00	7,127,933,085.00	12,756,886,544.00
1	20	07	Dinas Pendapatan Daerah	32,260,000,000.00	19,707,319,785.00	14,054,690,350.00	33,762,010,135.00
1	20	08	Kecamatan Bengkalis	0.00	6,073,536,925.26	9,512,413,151.00	15,585,950,076.26
1	20	09	Kecamatan Mandau	0.00	10,097,294,324.00	19,348,580,751.50	29,445,875,075.50
1	20	10	Kecamatan Bukit Batu	0.00	4,225,994,764.59	8,891,851,167.00	13,117,845,931.59
1	20	11	Kecamatan Rupat	0.00	4,151,219,787.00	11,682,104,552.00	15,833,324,339.00
1	20	12	Kecamatan Bantan	0.00	3,350,424,799.39	5,293,567,400.00	8,643,992,199.39
1	20	13	Kecamatan Pinggir	0.00	3,925,434,005.18	14,701,519,840.00	18,626,953,845.18
1	20	14	Kecamatan Siak Kecil	0.00	2,642,458,588.58	4,630,017,724.00	7,272,476,312.58
1	20	15	Kecamatan Rupat Utara	0.00	2,288,000,562.55	8,915,512,248.00	11,203,512,810.55
1	20	16	Badan Pengelola Perbatasan	0.00	4,944,993,440.56	2,729,600,318.00	7,674,593,758.56
1	20	17	Badan Kepegawaian Daerah	0.00	5,477,711,425.51	10,154,154,724.00	15,631,866,149.51
1	20	18	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	0.00	4,491,977,846.89	7,473,320,909.00	11,965,298,755.89
1	20	19	Urusan Otonomi Daerah;Pemerintahan Umum;Administrasi Keuangan Daerah;Perangkat Daerah;Kepegawaian dan Persandian (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu)	0.00	0.00	488,152,000.00	488,152,000.00
1	**21**		**KETAHANAN PANGAN**	**0.00**	**8,519,144,352.45**	**13,249,033,220.00**	**21,768,177,572.45**
1	21	01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0.00	8,519,144,352.45	7,136,303,150.00	15,655,447,502.45
1	21	02	Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Peternakan)	0.00	0.00	5,157,385,070.00	5,157,385,070.00
1	21	03	Urusan Ketahanan Pangan (Dinas Perkebunan dan Kehutanan)	0.00	0.00	955,345,000.00	955,345,000.00
1	**22**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**0.00**	**7,601,963,129.20**	**51,554,291,331.00**	**59,156,254,460.20**
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0.00	7,601,963,129.20	51,554,291,331.00	59,156,254,460.20
1	**23**		**STATISTIK**	**0.00**	**0.00**	**988,650,865.00**	**988,650,865.00**
1	23	02	Urusan Statistik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	0.00	0.00	988,650,865.00	988,650,865.00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
					TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1			2	3	4	5	6
1	24		**KEARSIPAN**	**0.00**	**0.00**	**195,962,100.00**	**195,962,100.00**
1	24	01	Urusan Kearsipan (Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi)	0.00	0.00	195,962,100.00	195,962,100.00
1	25		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**0.00**	**0.00**	**11,483,581,255.00**	**11,483,581,255.00**
1	25	01	Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika)	0.00	0.00	1,337,545,000.00	1,337,545,000.00
1	25	03	Urusan Komunikasi dan Informatika (Sekretariat Daerah)	0.00	0.00	10,146,036,255.00	10,146,036,255.00
1	26		**PERPUSTAKAAN**	**0.00**	**5,868,618,718.69**	**6,649,835,960.00**	**12,518,454,678.69**
1	26	01	Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi	0.00	5,868,618,718.69	6,649,835,960.00	12,518,454,678.69
2			**URUSAN PILIHAN**	**40,800,000.00**	**41,946,555,991.25**	**194,529,803,546.00**	**236,476,359,537.25**
2	01		**PERTANIAN**	**40,800,000.00**	**8,426,106,439.26**	**42,864,133,045.00**	**51,290,239,484.26**
2	01	01	Dinas Pertanian dan Peternakan	40,800,000.00	8,426,106,439.26	36,620,626,770.00	45,046,733,209.26
2	01	02	Urusan Pertanian (Dinas Perkebunan dan Kehutanan)	0.00	0.00	1,950,832,000.00	1,950,832,000.00
2	01	03	Urusan Pertanian (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan)	0.00	0.00	4,292,674,275.00	4,292,674,275.00
2	02		**KEHUTANAN**	**0.00**	**11,156,576,817.17**	**29,917,476,786.00**	**41,074,053,603.17**
2	02	01	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	0.00	11,156,576,817.17	29,917,476,786.00	41,074,053,603.17
2	03		**ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**	**0.00**	**5,437,314,273.00**	**49,945,536,796.00**	**55,382,851,069.00**
2	03	01	Dinas Pertambangan dan Energi	0.00	5,437,314,273.00	49,945,536,796.00	55,382,851,069.00
2	04		**PARIWISATA**	**0.00**	**0.00**	**5,813,633,676.00**	**5,813,633,676.00**
2	04	01	Urusan Pariwisata (Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga)	0.00	0.00	5,813,633,676.00	5,813,633,676.00
2	05		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**0.00**	**8,038,253,375.82**	**32,432,876,218.00**	**40,471,129,593.82**
2	05	01	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.00	8,038,253,375.82	31,906,795,645.00	39,945,049,020.82
2	05	02	Urusan Kelautan dan Perikanan (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan)	0.00	0.00	526,080,573.00	526,080,573.00
2	06		**PERDAGANGAN**	**0.00**	**0.00**	**20,688,430,265.00**	**20,688,430,265.00**
2	06	01	Urusan Perdagangan (Dinas Pasar dan Kebersihan)	0.00	0.00	17,174,609,600.00	17,174,609,600.00
2	06	02	Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	0.00	0.00	3,513,820,665.00	3,513,820,665.00
2	07		**INDUSTRI**	**0.00**	**8,888,305,086.00**	**9,861,550,960.00**	**18,749,856,046.00**
2	07	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	8,888,305,086.00	9,861,550,960.00	18,749,856,046.00
2	08		**KETRANSMIGRASIAN**	**0.00**	**0.00**	**3,006,165,800.00**	**3,006,165,800.00**
2	08	01	Urusan Ketransmigrasian (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	0.00	0.00	3,006,165,800.00	3,006,165,800.00
			TOTAL	**3,271,263,535,000.00**	**1,712,094,766,542.58**	**3,054,168,768,457.42**	**4,766,263,535,000.00**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	NETTO	
1			2	3	4	5	6
1			**URUSAN WAJIB**	**1,500,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**1,495,000,000,000.00**	**0.00**
1	20		**OTONOMI DAERAH;PEMERINTAHAN UMUM;ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH;PERANGKAT DAERAH;KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**	**1,500,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**1,495,000,000,000.00**	**0.00**
1	20	03	Sekretariat Daerah	1,500,000,000,000.00	5,000,000,000.00	1,495,000,000,000.00	0.00
			TOTAL	**1,500,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**1,495,000,000,000.00**	**0.00**

BUPATI BENGKALIS

(H. HERLIAN SALEH)

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TA 2012-2013

No.	Nomor Perda	Tanggal Penetapan	Perihal
Tahun 2012			
1	02	09 Maret 2012	Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
2	03	09 Maret 2012	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis
3	04	09 Maret 2012	Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
4	05	09 Maret 2012	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	06	30 Mei 2012	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri
6	07	30 Mei 2012	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis
7	16	30 Oktober 2012	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Tahun 2013			
1	01	11 Maret 2013	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013
2	02	01 Nopember 2012	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan